

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

*Pertama*, Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan implikasi politis dilaksanakannya kongres Medan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mega bahwa kongres tersebut dilakukan secara inkonstitusional. Maka para pendukung Mega memusatkan kegiatannya di Kantor DPP PDI Jl. Dipenogoro. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran kantor tersebut akan diambil alih oleh DPP hasil kongres Medan yang diketuai oleh Soerjadi. DPP hasil kongres Medan menegaskan bahwa yang berhak menduduki kantor adalah DPP Soerjadi yang notabene disetujui oleh pemerintah.

Aktivitas yang dilakukan di kantor DPP PDI oleh kubu Megawati, kemudian dinamakan sebagai Mimbar Bebas. Mimbar Bebas ini menurut beberapa orang sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban maka dari itu dikeluarkan perintah untuk segera menghentikannya. Peristiwa ini juga melahirkan konflik baru di dalam tubuh PDI sendiri yaitu Konflik antara kubu Megawati dengan Soerjadi. Keduanya merasa sebagai DPP yang sah, untuk itu kedua kubu ini bersikeras untuk mendapatkan kantor DPP di Jl. Dipenogoro.

Terjadinya dualisme kepemimpinan dalam PDI sendiri tentunya membawa pengaruh terhadap keberlangsungan partai. Selain konflik internal PDI yang kemudian dipengaruhi oleh konflik eksternal. Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa ikut mencampuri urusan dalam partai. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa terancam dengan tampilnya Mega sebagai ketua umum PDI. Peristiwa 27

Juli 1996 merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme politik yang ada.

*Kedua*, konflik diantara pimpinan PDI membawa sejumlah konsekuensi di dalam partai diantaranya solidaritas partai menjadi berkurang. Soerjadi melakukan berbagai cara agar kader-kader mau mendukungnya, mempengaruhi kader yang masa jabatannya akan segera berakhir dengan iming-iming menjadi calon legislatif. Reaksi dari setiap anggota partai berbeda-beda setelah Soerjadi mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pada dasarnya terjadi perubahan dalam hal mendukung Megawati maupun Soerjadi. Bagi anggota yang tetap mendukung Megawati, menyadari bahwa memiliki sikap politik yang berbeda dengan pemerintah yang otoriter akan memiliki konsekuensi pada karir atau posisi secara ekonomi maupun politik.

*Ketiga*, penyelesaian Peristiwa 27 Juli 1996 dilakukan secara politik, hal ini dilakukan karena tidak bisa melalui jalur hukum. Tidak adanya bukti yang cukup mengakibatkan kasus ini tidak dapat diproses secara hukum. Kubu Megawati harus puas terhadap apa yang diputuskan oleh pengadilan, diantaranya delapan dari 124 terdakwa diputus bebas murni karena tidak ada di tempat kejadian saat peristiwa penyerbuan tersebut berlangsung. Sementara 116 orang terdakwa lainnya diperintahkan untuk dibebaskan, karena hukuman tahanan empat bulan tiga hari telah dipotong masa tahanan.

Namun, hasil ini tidak membuat para pengacara dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa cepat puas. Mereka pun mengajukan banding, esensi dari peradilan mereka persoalkan yaitu apakah pantas para pendukung Megawati yang bertahan di kantor Jalan Diponegoro itu diadili, padahal merekalah yang diserang.

Majelis hakim dalam keputusannya menyebutkan, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atas dakwaan subsider, yaitu pelanggaran atas pasal 218 jo pasal 55 ayat 1, KUHP. Mereka terbukti tidak mematuhi perintah aparat keamanan atas nama kekuasaan untuk

membubarkan diri. Ketika Megawati menjabat sebagai presiden tahun 2001 untuk menggantikan Abdurrahman Wahid, membawa harapan bagi para korban Peristiwa 27 Juli supaya kasus ini kembali dibuka dan diselesaikan secara hukum. Namun harapan ini ternyata tidak terpenuhi sampai akhirnya Mega turun dari jabatan Presiden, kasus ini dianggap sudah selesai.

*Keempat*, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini terhadap PDI yaitu terpecahnya PDI menjadi dua terlihat dari adanya PDI Soerjadi dan PDI Mega. Tersingkirnya kubu Megawati karena tidak dikehendaki oleh pemerintah dan naiknya kubu Soerjadi sebagai pihak yang direstui oleh pihak yang sedang berkuasa.

Selain itu dampak lain dari peristiwa ini adalah merosotnya nilai saham, hal ini terjadi karena investasi asing memang sangat tergantung dari keadaan politik. Akibatnya investasi asing menjadi tertunda sampai keadaan politik membaik. Nilai tukar rupiah juga menjadi anjlok, banyak masyarakat yang terburu-buru untuk menukarkan rupiah kepada dollar.

Akibat lainnya yaitu terjadi pergeseran di elit ABRI, dicopotnya Letjen TNI Soeyono dari jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI dan Mayjen TNI Syamsir Siregar dari jabatan Kepala Badan Intelijen ABRI (Ka BIA). Dugaan bahwa penggantiannya erat berkaitan dengan Peristiwa 27 Juli memang beralasan. Dalam situasi konflik PDI yang semakin memuncak, sebagai tangan kanan Pangab dalam urusan pengoperasian pasukan, Soeyono seharusnya siap siaga. Sedangkan, Kepala BIA Syamsir Siregar, menurut kabar yang beredar saat itu, dianggap bersalah karena tidak cukup antisipatif terhadap munculnya gerakan yang dilakukan aktivis PRD.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal dari penelitian tentang Peristiwa 27 Juli 1996 (Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi) ini perlu diteliti lebih lanjut, antara lain dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 terhadap PDI. Penjelasan mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi ini memang kurang dibahas secara

mendalam. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber atau data yang membahas mengenai dampak Peristiwa 27 Juli 1996 terhadap PDI. Selain itu, dalam hal pencarian narasumber sebagai sumber lisan yang berhubungan dengan kajian penelitian. Peneliti hanya mampu mewawancarai beberapa narasumber dari satu pihak saja (kubu Megawati) sehingga hasil dari penelitian ini berdasarkan sudut pandang kubu Megawati.

## 5.2 Saran

Pada penelitian ini penulis tidak membahas mengenai dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 terhadap perpolitikan Indonesia. Penulis beranggapan jika hal tersebut diteliti akan menarik sekali dan memberikan pemahaman lebih baik mengenai keadaan politik Indonesia pasca Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang penulis mengharapkan perlu adanya pengembangan penelitian mengenai dampak dari Peristiwa 27 Juli 1996 terhadap perpolitikan Indonesia.

Kemudian rekomendasi bagi sekolah-sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi pada pembelajaran sejarah di sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Materi dari penelitian ini sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) kelas XII program Ilmu Pengetahuan Sosial semester II dengan SK menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya reformasi dan KD menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya reformasi.